

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke 2 Bulan Mei 2021 (tanggal 7 Mei s.d. 13 Mei)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

WASPADA GELOMBANG COVID-19 PASCA LARANGAN MUDIK 2021

Mohammad Teja

Peneliti Muda/ Sosiologi

teja@dpr.go.id



ISU ATAU PERMASALAHAN

Terjadi peningkatan kasus penularan Covid-19 di sejumlah daerah bahkan setelah masa pengetatan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri diberlakukan pada 22 April s.d. 6 Mei 2021, satu hari sebelum larangan mudik lebaran. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan, terjadi kenaikan jumlah kasus baru di beberapa daerah seperti Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dengan jumlah kasus kematian terbanyak di Jawa Tengah, diikuti Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Aceh. Oleh sebab itu Satgas Covid-19 meminta agar tiap daerah segera mengevaluasi penanganan pasien terutama yang bergejala sedang dan berat, juga pengawasan penerapan prokes di tiap-tiap daerah tersebut.

Larangan mudik yang diberlakukan oleh Pemerintah pada tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021 tidak terlepas dari melonjaknya temuan kasus Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia, dan juga berkaca dari kasus India yang lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Larangan mudik kemudian disiasati pemudik dengan lebih dulu datang ke daerahnya masing-masing sebelum tanggal larangan ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, misalnya di Kabupaten Pekalongan yang menerapkan tes *rapid* terhadap pemudik, dan yang diketahui positif langsung diisolasi. Hal ini juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dapat menjadi buruk dan tak terkendali. jika pengawasan lengah/longgar terhadap penerapan protokol kesehatan, *surveilans*, khususnya tes dan lacak pelaku perjalanan dari luar negeri dan pengawasan yang ketat terhadap kedatangan Warga Negara Asing di pintu-pintu masuk strategis ke wilayah Republik Indonesia. Terjadinya penurunan ketaatan warga terhadap protokol Kesehatan, menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, hal ini menjadikan masyarakat bertambah rentan terhadap penularan dan penyebaran virus Covid-19.

Masyarakat tetap mudik meski ada larangan dari Pemerintah, meskipun sudah dilakukan penyekatan di 381 pos dalam operasi Ketupat 2021 yang melibatkan 155.000 personel gabungan. Masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan dalam pengecualian larangan mudik akan diputar balik. Di beberapa titik penyekatan, masih terjadi pemudik nekat yang menerobos barikade hingga malam lebaran. Dalam operasi tersebut empat pemudik didapati membawa hasil tes antigen palsu untuk mengelabui petugas, padahal mereka mengaku membeli surat tersebut dari seorang calo dengan harga Rp175.000,00 per surat. Dari hasil tes acak dalam operasi ketupat 2021, ditemukan indikasi penyebaran penularan yang cukup signifikan setelah diketahui sebanyak 4.123 pemudik positif Covid-19.

Perlu kewaspadaan terhadap lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia dengan peningkatan pemeriksaan terhadap orang yang keluar masuk antar daerah secara ketat. Persiapan antisipasi mobilisasi, inventarisasi alat kesehatan dan mempersiapkan lokasi Rumah Sakit Darurat jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 di tiap daerah yang memiliki potensi besar lonjakan kasus.

Jika larangan mudik ternyata masih belum bisa mengurangi penyebaran kasus Covid-19, Pemerintah Pusat dan Daerah mau tidak mau harus mencari cara yang efektif dalam mengurangi atau bahkan memutus penyebaran virus ini dengan cara mendorong masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat dengan pengawasan yang berkesinambungan dan terukur. Pemerintah harus lebih fokus kepada penegakan protokol kesehatan dengan melakukan tes antigen secara masif untuk menekan jumlah kasus yang saat ini sudah menjadi tiga varian baru (di Inggris, Afrika Selatan dan India) dan penularannya sudah terjadi di Indonesia.



SUMBER

Kompas, 28, 30 April 2021; Kompas, 5,9 Mei 2021; Media Indonesia, 2 Mei 2021.